

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam kurun Waktu PELITA I-PELITA IV*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1990;
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010;
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008;
- Bagir Manan, *Teori dan Polik Konstusi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2003;
- Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, 1997;
- Cekli Setya Pratiwi dkk, *Penjelasan Hukum Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, Jakarta;
- Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta;
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1989;
- Dharma Setyawan Salam, *Manajemen Pemerintahan Indonesia*, 2004;
- Guntur Setiwan, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004;
- Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, RT. Raja Grafindo Persada Bandung, 2006;
- Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2005;
- _____, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006;

- _____, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006;
- Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi. Yogyakarta, 2009;
- Melayu S.P Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Revisi, Bumi Aksara, Jakarta, 2007;
- Miriam budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008;
- Moh Fadli, *Peraturan Delegasi di Indonesia*, UB Press, Malang, 2011;
- _____, *Perkembangan Peraturan Delegasi Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2011;
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indoensia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara FH. Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti, 1981;
- Onong Uchjana Efendi, *Ilmu Komunikasi;Teori dan Praktik*, CV. Remaja Karya, Bandung, 1986;
- Paulus Effendi Lotulung, *Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance) Dalam Korelasinya Dengan Hukum Administrasi*, dalam Philipus M. Hadjon, *et.al.*, *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2012;
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006;
- Ronny Hanitijio Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalian Indonesia, Jakarta, 1998;
- Sarundajang, *Babak Baru Sistim Pemerintahan*, Kata Hasta Pustaka, Jakarta, 2012;
- Sedianingsih, dkk, *Teori dan Praktik Administrasi Kesekretariatan*, Kencana Prenada Media Group, Surabaya, 2008;
- Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*, Bagian Kedua, Bandung: CV. Mandar Maju, 2004;
- SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2011;

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998;

Soewarno Handayaniingrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, 2002;

Stephen P. Robbins, *Perilaku Organisasi; Konsep, Kontroversi, dan Aplikasi*, PT. Prehallindo, Jakarta, 2001;

Tim Penyusun, *Panduan Penyusunan Penulisan Hukum*, Bandung, 2018;

Tim Penyusun, *Rencana Strategis Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR-RI Tahun 2016-2019*, Sekretariat Jenderal DPR-RI, Jakarta, 2016;

Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2010;

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD;

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Keputusan Presiden No. 14 Tahun 1960 Tentang Peraturan Tata Tertib DPR-GR Republik Indonesia;

Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1964 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

Keputusan Presiden No. 7 Tahun 1966 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Presiden No.7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

Peraturan Presiden No.27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR-RI;

Peraturan Presiden No.26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Peraturan DPR No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPR No. 3 Tahun 2015;

Peraturan Sekretariat Jenderal No. 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR-RI;

Peraturan Sekretariat Jenderal No. 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretariat Jenderal No. 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR-RI.

C.Sumber Lain

Abdul Rahman dan Riani Bakri, *Penataan Pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Melalui Dynamic Governance*, JURNAL KONSTITUEN, Vol. 1 No. 1, Tahun 2019;

Ahmad Husen, *Eksistensi Peraturan Presiden Dalam Sistem Peraturan Perundang Undangan*, Lex Scientia Law Review, Volume 3, No. 1, Tahun 2019;

Arif Usman, “Peran Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dalam Memberikan Dukungan Keahlian Untuk menguatkan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode Tahun 2004-2009”, Tesis, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta;

C.J.N.Versteden dalam Julista Mustamu, *Diskresi Dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan*, Jurnal Sasi, Vol. 17 No. 2 Bulan April-Juni 2011;

Efi Yulistyowati, Endah Pujiastuti, dan Tri Mulyani, *Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia : Studi Komparatif atas Undang–Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen*, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Vol. 18, No. 2, 2016;

- Endang Komara, *Kompetensi Profesional Pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) di Indonesia*, MIMBAR PENDIDIKAN: Jurnal Indonesia untuk Kajian Pendidikan, Volume 4(1), Tahun 2019;
- Hendra Wahanu Prabandani, *Batas Konstitusional Kekuasaan Eksekutif Presiden*, Jurnal Legislasi Indonesia, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 12, No. 3, Tahun 2015;
- J.G. Brouwer dalam Sonny Pungus, *Teori Kewenangan*, <http://sonny-tobelo.blogspot.com/2011/01/teori-kewenangan.html> , diunduh pada Selasa 29 Oktober 2019, pukul 16.09 Wib;
- Muhammad Ilham Arisaputra, *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Reformasi Agraria Di Indonesia*, Yuridika: Volume 28 No 2, Tahun 2013;
- Muliadi Anangkota, *Klasifikasi Sistem Pemerintahan Perspektif Pemerintahan Modern Kekinian*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3, No. 2, Tahun 2017;
- Ni Putu Yai Laksmi dan I Ketut Markeling, *Penyelenggaraan Manajemen ASN Berdasarkan Sistem Merit Menurut Pasal 51 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*, Vol 06 No.04, Tahun 2018;
- Sri Soemantri, “*Lembaga Negara dan State Auxiliary Bodies dalam Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*”, Disampaikan dalam dialog hukum dan non hukum “*Penataan State Auxiliary Bodies dalam Sistem Ketatanegaraan*” Departemen Hukum dan HAM RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya 26-29 Juni 2007;
- Surohmat, *Fungsi Presiden dalam Kekuasaan Pemerintah*, Al Qisth Law Review, Vol. 1, No.1, Jakarta, Tahun 2017;
- Rahayu Prasetyaningsih, *Menakar Kekuasaan Presiden dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, PJIH, Volume 4 No. 2, Tahun 2017;
- Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata, *Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Negara Hukum: Vol. 9, No. 1, Tahun 2018;